KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Penerbangan Cs : Komisi V Tak Ingin Prosesnya Tertunda
Tanggal : Senin, 10 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Revisi UU Penerbangan Cs

Komisi V Tak Ingin Prosesnya Tertunda

KOMISI V DPR ingin segera merevisi Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Perkeretaapian, dan Undang-Undang Pelayaran. Badan Keahlian DPR pun diminta untuk menyiapkan secara detail poin-poin perubahan dalam ketiga undang-undang tersebut. DPR tak mau RUU ini malah kandas seperti halnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Anggota Komisi V DPR Muh. Aras mengatakan, sejatinya Badan Keahlian DPR telah memberikan gambaran terkait perlunya revisi terhadap ketiga undang-undang tersebut. Perubahan ini dibutuhkan untuk menjawab berbagai perkembangan teknologi dan informasi yang makin berubah.

"(Revisi) Tentu harus kita sesuaikan juga dengan undang-undang yang akan mengatur seluruh kegiatan baik perniagaan maupun operasional lainnya," kata Aras.

Untuk itu, dia mendorong agar Badan Keahlian DPR dapat menjelaskan lebih konkret poin-poin perubahan yang dianggap perlu dalam revisi ketiga undang-undang ini. Dia tidak ingin, ketika diusulkan, tiga RUU ini malah berakhir dengan penundaan.

"Makanya perlu kiranya Badan Keahlian untuk bisa menguatkan kami dan mengusulkan (revisi) di Badan Legislasi. Sehingga tidak mengalami nasib seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah mengalami proses begitu panjang, pembahasan berulang-ulang, dan terakhir harus di-pending," ujarnya.

Dia juga meminta Badan Keahlian DPR dapat menyiapkan strategi agar ketika tiga undang-undang ini diusulkan masuk dalam program legislasi nasional, tidak perlu lagi melalui proses yang panjang untuk dibahas. Termasuk teknisnya sehingga jika tidak ada aral melintang, ketiga undang-undang ini bisa dibahas mulai tahun ini. Apalagi sepanjang tahun 2023 ini, Komisi V DPR belum memiliki agenda sama sekali untuk membahas legislasi.

Oleh karena itu, politisi Fraksi PPP ini berharap Komisi V bisa sepakat untuk mengusulkan ketiga undang-undang tersebut masuk dalam program legislasi. "Nah mudah-mudahan ini tidak membutuhkan waktu yang panjang sehingga bisa kita mulai pembahasannya di tahun 2023. Karena itu perlu gerak cepat dari teman-teman Komisi V yang tentunya di-*support* oleh Badan Keahlian DPR," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta agar Komisi V juga dapat menyiapkan program legislasi lainnya yang terkait dengan fungsi dan kewenangan di Komisi V. Tentunya program legislasi ini terkait dengan mitra-mitra kerja baik itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal), dan mitra-mitra lainnya. ■ KAL